



# BPK Pra Audit Kapuas Hulu Pemkab

Kalbar saat ini tengah melakukan pra audit pengelolaan keuangan Pemkab Kapuas Hulu tahun anggaran 2013. Pra audit itu dilakukan selama 25 hari yang akan berakhir pada tanggal 14 Maret mendatang.

"Tim BPK RI Perwakilan Kalbar dalam tahap pengumpulan data, pra audit dilakukan secara keseluruhan mulai dari kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Pengumpulan data ini sampai SPj yang wajib dilaksanakan tugas atau yang berkaitan dengan kegiatan fisik di lapangan," ujar Drs H Syafaruddin MM, Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Kapuas

Hulu, Rabu (5/3).

Menurutnya, Inspektorat Kapuas Hulu ikut membantu BPK memfasilitasi pengumpulan data dalam pra audit ini. Caranya, inspektorat melakukan review keuangan keseluruhan di Kapuas Hulu. Bila ada instansi atau dinas yang datanya tidak cocok, agar segera diperbaiki. "Pada hari ini (kemarin, red) kita harap semua instansi sudah clear. Karena saat ini baru sekitar 98 persen yang clear," kata Syafaruddin.

Sebab dikatakannya, bila inspektorat belum melakukan review, maka BPK belum bisa menjalankan tugasnya. Untuk itu, tim BPK dan tim review

kabupaten bekerjasama dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

Bila ada kekurangan dari tim review kabupaten, lanjut Syafaruddin, maka BPK memberitahu, begitu juga sebaliknya. Review laporan keuangan ini nantinya akan dilaporkan inspektorat ke Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Setelah itu akan disampaikan ke BPK RI dengan tembusannya kepada Gubernur Kalbar. "Setelah pra audit ini selesai, maka tim BPK nantinya akan turun lagi guna melakukan pemeriksaan," jelasnya.

Syafaruddin mengklaim se-

lama ini laporan keuangan Kapuas Hulu cukup baik, namun harus lebih ditingkatkan. Pasalnya Kapuas Hulu memiliki target memperbaiki kinerja disektor pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban keuangan dan neraca keuangan.

"Pengelolaan keuangan kita harus berbasis kinerja, dimana kegiatannya jelas, lokasinya jelas, sasarannya jelas, peruntukannya jelas dan dananya pun jelas. Untuk itu prinsip akuntabel, transparansi, efektif dan efisien harus benar-benar dipegang," pungkasnya.

Laporan: Arman Hairiadi  
Editor: Julianus Ratno



H Syafaruddin - Arman Hairiadi

Putussibau-RK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan